

# PENGEMBANGAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK MENGATASI KEMISKINAN<sup>1</sup>

## (DEVELOPING SOCIAL WELFARE ORGANIZATION FOR POVERTY ELUVITION)

Anwar Sitepu<sup>2</sup> dan Irmayani<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengembangkan LKS Mitra Warga di Desa Pasir Karag, agar berfungsi optimal sebagai wadah masyarakat mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial, terutama kemiskinan; 2) Merumuskan konstruksi LKS yang dapat menjadi wadah masyarakat mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial warganya secara mandiri dan berkelanjutan. Penelitian dilakukan dengan teknik *action research*, diawali dengan *review*. Hasil *review* menunjukkan LKS Mitra Warga yang dibentuk tahun 2010 yang lalu belum cukup berkembang sesuai target. Melalui diskusi dengan perwakilan masyarakat termasuk pengurus dicapai kesepakatan bahwa perkumpulan sosial tersebut masih sangat relevan, karena itu perlu dilakukan sejumlah kegiatan yang bertujuan mengembangkan organisasi. Evaluasi pada akhir kegiatan memperlihatkan bahwa Mitra Warga sudah berkembang signifikan, mulai mampu menjalankan fungsinya. Hal tersebut berarti bahwa sejumlah tindakan interventif yang dilakukan berhasil mengembangkan organisasi. Kedua, konstruksi LKS sebagai perkumpulan sosial warga desa, dengan sistem keanggotaan terbuka, dikelola dengan azas-azas organisasi modern, demokratis, dengan melaksanakan kegiatan terpadu sosial ekonomi, seperti dirumuskan tahun lalu ternyata dikuatkan melalui penelitian ini.

Kata kunci: Lembaga Kesejahteraan Sosial, mandiri dan berkelanjutan, kemiskinan

### Abstract

This study aims to: 1) Developing Social Welfare Organization (LKS) Mitra Warga in Desa Pasir Karag to works optimally as the community forum in order to overcome social welfare problems, especially poverty; 2) Formulating Social Welfare Organization (LKS) that could become a community forum that overcome their own poverty problems group independently and sustainably. Research conducted by using *Action Research* method, which was begins by doing reviews. From the reviews discovered that LKS Mitra Warga that established in 2010 does not grow up accordance with the target set before. By discussing with the community representative, including the boards, they got agreement that LKS is still relevant, and needs to make some activities to develop the organization. The evaluation at the end of the study shows that: 1) LKS Mitra Warga shows significant development and begins to perform its functions. It means that the interventive action taken has developed the organization successfully. 2) LKS construction as villager social organization, with open membership system, and manage with modern and democratic organization principle by implementing integrated socio-economic activities as formulated last year is reinforced by this study.

Keywords: Social Welfare Organization, independently and sustainably, poverty

---

<sup>1</sup> Diangkat dari penelitian Pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk Mengatasi Kemiskinan yang dilakukan oleh tim peneliti Puslitbang Kessos, 2011, dibiayai APBN melalui Program Insentif Peneliti dan Perekayasa Kementerian Riset dan Tehnologi. Tim peneliti terdiri dari empat orang, yaitu: Anwar Sitepu (ketua), Setyo Sumarno, Togiaratua Nainggolan dan Irmayani (anggota).

<sup>2</sup> Anwar Sitepu, lahir di Sumatera Utara, 4 September 1958, memperoleh gelar Magister Profesional bidang pengembangan masyarakat dari Sekolah Pascasarjana IPB Bogor, peneliti pada Puslitbang Kessos, Badiklit, Kementerian Sosial RI. Email: sitepu.anwar@yahoo.co.id

<sup>3</sup> Irmayani, Lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 1968, Menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Trisakti tahun 1992 dan Magister Psikologi Sosial di Universitas Gajah Mada tahun 2002. Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian aksi “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial” yang dilaksanakan tahun 2010 yang lalu. Tujuannya untuk: 1) Meningkatkan keberdayaan masyarakat agar memiliki kemampuan mengatasi masalah kesejahteraan sosial warganya secara mandiri dan berkelanjutan; 2) Merumuskan draf konstruksi lembaga kesejahteraan sosial sebagai wadah masyarakat mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial warganya secara mandiri dan berkelanjutan.

Penelitian tersebut telah berhasil mendorong masyarakat Desa Pasir Karag mendirikan perkumpulan sosial, yang dinamakan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Mitra Warga, sebagai wadah kerjasama warga masyarakat mengatasi masalah kesejahteraan sosial sesamanya. Pada pihak lain, telah berhasil dirumuskan draf konstruksi LKS yang dipandang efektif dan efisien sebagai wadah kerjasama masyarakat menopang keluarga melaksanakan fungsinya memenuhi kebutuhan anggotanya, mengatasi masalah kesejahteraan sosial secara mandiri dan berkelanjutan (lihat tabel).

LKS Mitra Warga yang dideklarasikan pada tanggal 24 Juli 2010 di Desa Pasir Karag, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Banten, belum memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), seluruh ketentuan masih berupa daftar kesepakatan. Tujuan LKS tersebut, seperti disepakati pada waktu itu adalah: 1) Meningkatkan kesejahteraan warga; dan 2) Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat. Kelengkapan organisasi terdiri dari Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pengurus dan Pengawas. Pengurus, terdiri dari unsur: 1) Ketua; 2) Sekretaris; 3) Bendahara I & II; 4) Seksi Pelayanan Sosial; 5) Seksi Pelayanan

Ekonomi. Sedangkan Pengawas terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota.

Untuk mewujudkan tujuannya, seluruh anggota sepakat untuk bekerjasama saling membantu. Dalam membantu sesamanya LKS menganut prinsip kemandirian, dalam arti mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak tergantung pada bantuan pihak lain, termasuk pemerintah maupun donatur. Untuk itu, LKS menyelenggarakan dua kegiatan pokok yang saling menunjang, yaitu: 1) Pelayanan sosial dan 2) Pelayanan ekonomi. Pelayanan ekonomi dimaksud adalah kegiatan penggalangan dan penyaluran dana bersama melalui mekanisme tabungan dan pinjaman. Setiap orang anggota diwajibkan menabung pada LKS secara rutin minimal sekali dalam sebulan. Dana bersama yang sudah terakumulasi kemudian digunakan membantu anggota yang membutuhkan. Namun bantuan bukan sebagai hibah atau derma melainkan dalam bentuk pinjaman murah dan cepat. Pinjaman dapat digunakan untuk aneka keperluan keluarga, seperti biaya pendidikan, kesehatan, rumah, atau untuk modal usaha dan lainnya. Sedangkan Pelayanan sosial dimaksud meliputi bidang amat luas sesuai kesepakatan, yang seluruhnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Melalui mekanisme seperti ini masyarakat diharapkan dapat saling membantu secara terus-menerus, tanpa saling merugikan, sebaliknya bahkan membangun kebiasaan baik, martabat dan harga diri.

Sebagai sebuah perkumpulan yang baru dibentuk, LKS Mitra Warga belum terbukti efektifitasnya. Demikian juga draf konstruksi LKS yang baru dirumuskan masih perlu dikaji dan disempurnakan. Penelitian tahun 2011 ini dimaksud sebagai upaya pengembangan LKS Mitra Warga sekaligus penyempurnaan draf konstruksi yang telah dirumuskan. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah: 1) Bagaimana

mengembangkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Mitra Warga di Desa Pasir Karag agar berfungsi optimal sebagai wadah masyarakat mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial, terutama kemiskinan ?; 2) Bagaimana konstruksi LKS yang dapat berfungsi optimal sebagai wadah masyarakat mengatasi permasalahan kesejahteraan sosialarganya secara mandiri dan berkelanjutan ?

Konstruksi LKS yang diformulasikan diharapkan menjadi solusi dalam upaya peningkatan efektifitas dan efesiensi pembangunan kesejahteraan sosial pada umumnya, termasuk dan terutama dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam Undang-Undang Nomor 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dinyatakan bahwa upaya penanganan fakir miskin dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: penyediaan sumber mata pencaharian, bantuan permodalan, akses pemasaran hasil dan penguatan kelembagaan atau organisasi masyarakat dan pemerintahan desa (pasal 22 sampai 26). Formulasi konstruksi LKS didesain sedemikian rupa, mengandung mekanisme internal yang tidak hanya mampu merubah potensi menjadi sumber yang dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya secara berkelanjutan, seperti dikehendaki dalam Renstra Kemsos 2009-2014. Formulasi konstruksi LKS dirancang untuk sekaligus mampu menjamin berkelanjutan potensi dan sumber dimaksud bahkan mampu menjadi “mesin sosial” menumbuhkan dan memelihara integrasi sosial dan menopang pertumbuhan mandiri masyarakat.

Lebih jauh, aplikasi LKS secara luas kelak akan mengantarkan pembangunan kesejahteraan sosial, termasuk Kementerian Sosial pada posisi strategis, bukan sekedar memboroskan anggaran tetapi secara riil menopang pembangunan nasional secara luas, mulai dari

pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan sampai politik dan ketahanan. Konstruksi LKS yang dihasilkan melalui penelitian ini diharapkan digunakan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Keluarga dan Kelembagaan pada Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Pemerintah Daerah sebagai strategi penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial pada umumnya secara massive. Lembaga kesejahteraan atau organisasi sosial (orsos) model konvensional kurang memadai menjadi alat melakukan gerakan besar, menyentuh akar masalah secara luas.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode Action Research. Penelitian dilakukan di Desa Pasir Karag, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kegiatan penelitian dilakukan melalui proses sebagai berikut: Pertama, *review* atas kondisi LKS Mitra Warga dan masyarakat setempat pasca penelitian tahun 2010 (*look*). Kedua, menganalisis perkembangan LKS apakah sesuai seperti direncanakan? Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan perubahan kondisi masyarakat dibanding akhir tahun 2010. (*think*). Ketiga, berdasarkan hasil analisis, bersama pengurus dan pengawas dilakukan langkah-langkah berikut (*act*): 1) Penetapan rencana selanjutnya, mengatasi kendala yang dihadapi; 2) Pelaksanaan rencana yang telah disepakati; 3) Monitoring dan evaluasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Desa**

Desa Pasir Karag, adalah salah satu dari 13 desa di Kecamatan Koroncong. Desa-desain lain di kecamatan ini adalah : Gerendong, Koroncong, Pakuluran, Paniis, Kerangsetra, Setrajaya, Cigadung, Pagadungan, Kadumerak, Tegalongok, Pasir Karag, Pasir Jaksa dan desa Bangkonol. Wilayah Desa Pasir Karag

meliputi luas 200,501 ha, dengan topografi berbukit-bukit. Di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pagadungan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pasir Jaksa. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tegalongok, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Dilihat dari peruntukannya, lahan di desa Pasir Karag sebagian terbesar, 152 ha, dimanfaatkan untuk sawah dan ladang, sisanya untuk pemukiman dan lainnya.

Pemukiman penduduk di desa ini terpecar dalam kelompok yang saling terpisah, yang disebut kampung. Seluruhnya terdapat 9 kampung, yaitu: Pasir Karag, Heas, Mesjid, Pasir Putat, Pasir Baros, Ciwaluran, Kadu Dampit dan Kampung Baru. Diantara masing-masing kampung terdapat lahan pertanian sawah atau ladang. Kampung-kampung tampak seperti berada di tengah hutan karena seluruh lahan kering dipenuhi oleh pepohonan yang tinggi, seperti pohon kelapa, melinjo, albasia dan lainnya. Jalan menuju desa ini relatif baik, diaspal, namun sekitar 4 km terasa sempit, badan jalan hanya seukuran kendaraan kecil. Desa yang dikategorikan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang (2010) sebagai salah satu dari 200-an desa tertinggal ini sesungguhnya tidak jauh dari pusat pemerintahan, dengan kendaraan roda empat dapat ditempuh sekitar 30 menit. Namun tidak terdapat angkutan umum masuk/keluar desa. Untuk mendapat angkutan umum ke Kota Pandeglang, orang harus jalan kaki atau naik ojek sejauh 4 km ke desa Bangkonol.

Dilihat dari jumlah penduduk, Pasir Karag relative kecil, meliputi sebanyak 1.243 orang terdiri dari laki-laki 649 orang dan perempuan 596 orang, dengan 270 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 9 kampung. Jumlah penduduk di masing-masing kampung bervariasi antara 83 sampai 200 jiwa (tabel 1), terbanyak adalah di Kampung Baru (16,2%), sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di Ciwaluran (7,5%).

Tabel 1: Banyaknya Penduduk Desa Pasir Karag Menurut Kampung, Jenis Klamis dan Persentase, Tahun 2009

Nama Kampung	Penduduk				KK
	L	P	Jlh	%	
Pasir Karag	85	79	164	13,1	30
Heas	59	52	111	8,9	18
Mesjid	83	82	165	13,2	39
Pasir Bango	50	48	98	7,9	22
Pasir Putat	43	42	85	6,8	23
Pasir Baros	71	75	146	11,7	36
Ciwaluran	53	41	94	7,5	22
Kadu Damping	92	88	180	14,4	38
Kampung Baru	111	89	200	16,2	40
Jumlah	647	596	1.243	100	270

Sumber: Monografi Desa Pasir Karag, Tahun 2009

Pendidikan penduduk relatif rendah. Data sekunder dari kantor desa menunjukkan bahwa penduduk berpendidikan SLTA hanya 35 orang, sementara akademi 4 orang, dan sarjana 3 orang. Kondisi ini menyebabkan wawasan berfikir sebagian besar masyarakat sangat dangkal, yang berkorelasi dengan besarnya angka pengangguran. Remaja setempat umumnya bersekolah hingga tamat SMP, setelah itu pergi ke kota (Jakarta, Tangerang, Bekasi) bekerja sebagai buruh (pabrik, bangunan) atau PRT.

Masyarakat Desa Pasir Karag relatif homogen, yaitu etnik Sunda, seluruhnya beragama Islam (Data Monografi Desa, 2009). Nuansa umum kehidupan masyarakat tampak khas Islam-Sunda-Banten. Nilai-nilai dan tradisi yang jadi acuan umum adalah nilai-nilai Islam-Sunda-Banten. Sholat lima waktu, sembahyang jumat, puasa pada bulan puasa dan merayakan lebaran. Ustad merupakan tokoh penting dan dihormati. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Sunda khas Banten. Sementara itu "jawara" sebagai pola kepemimpinan khas Banten tidak terasa actual di desa ini, tidak ditemukan seseorang disebut sebagai jawara.

Kearifan lokal khas terkait kesejahteraan antara lain adalah rereongan sarumpi dan ngukut. Rereongan sarumpi merupakan suatu kegiatan pengumpulan dana (sumbangan) yang dilakukan warga masyarakat untuk membantu warga yang terkena musibah, menyantuni anak terlantar, lanjut usia dan menangani masalah-masalah lainnya yang bersifat sosial. Sedangkan ngukut, adalah bantuan sosial dalam bentuk pengasuhan anak (keponakan ataupun kerabat) yang kondisi sosial ekonominya miskin untuk dibesarkan, disekolahkan, diasuh, bahkan sampai dianggap sebagai anaknya sendiri.

Mata pencaharian sebagian terbesar penduduk adalah bertani, 550 orang, mulai dari petani pemilik lahan, petani penggarap dan buruh tani. Selain itu, pedagang 55 orang, swasta 67 orang, tukang bangunan 15 orang, PNS 4 orang dan selebihnya bekerja pada sektor swasta, ABRI maupun pensiunan dan pekerja migran. Dari berbagai jenis mata pencaharian tersebut, yang tampak dominan adalah bertani, buruh tani dan pekerja migran.

Pertanian di desa ini terbagi dua, yaitu: pertanian lahan basah (sawah) dan pertanian lahan kering (kebun). Areal sawah tampak lebih sempit dibanding areal lahan kering. Di sawah tanaman yang umum ditanam adalah padi dengan frekwensi tiga musim tanam setiap tahun. Sedangkan lahan kering pada umumnya digunakan untuk tanaman keras, seperti : melinjo, kelapa dan albasia. Albasia sekitar 15 tahun terakhir berkembang menjadi tanaman primadona. Pohon ini dapat dipanen pada usia lima tahun dengan harga memadai, saat ini sekitar Rp.100.000 per pohon. Dalam satu hektar lahan dapat ditanami sebanyak 1.500 pohon. Satu pohon dapat dipanen dua kali karena setelah dipotong sekali masih akan tumbuh anak atau tunasnya.

Melinjo (tangkil) biasanya diambil buah dan daun mudanya. Buah melinjo dijual segar untuk dijadikan sayur atau diolah menjadi emping. Di desa ini beberapa orang bekerja sebagai pengusaha pengolahan melinjo menjadi emping. Harga emping di desa ini sekitar Rp.20.000/kg. Buah melinjo segar berharga Rp.2.500 per kg, untuk memperoleh sekilo emping diperlukan 4 kg melinjo. Ongkos pengolahan seharga Rp.2.500 / kg. Dari tanaman kelapa biasa dijual buah kelapa muda. Harga jual dari petani Rp.1.800 (masih di pohon). Ongkos petik Rp.200 per buah. Oleh pedagang buah kelapa biasa dijual ke Jakarta seharga Rp.2.300 hingga Rp.2.500 per buah. Persoalannya adalah mayoritas warga setempat, sekitar 70 persen, tidak memiliki lahan, sehingga hasil (produk) pertanian sebagian besar dinikmati oleh sejumlah kecil orang lain. Mayoritas warga hanya memperoleh hasil dari jasa sebagai buruh

Berbagai lembaga yang terdapat di desa ini adalah: pemerintah desa, meliputi kepala dan sekretaris desa serta perangkat pendukungnya. Di bawahnya terdapat kepala dusun atau kampung, Ketua RW dan RT. Di samping itu terdapat Badan Perwakilan Desa (BPD), namun tampak tidak aktif, bahkan hubungannya dengan eksekutif desa kurang harmonis. Lembaga lain yang menonjol adalah perkumpulan ibu-ibu, yang disebut Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kegiatannya adalah melaksanakan pengajian rutin, posyandu, dan pendidikan anak usia dini (PAUD). Dalam bidang pendidikan, selain dua PAUD, desa ini juga memiliki dua sekolah dasar negeri. Menurut pemantauan peserta diskusi dan wawancara dengan beberapa sumber, semua anak usia sekolah dasar, 7 sampai 12 tahun, di desa ini dalam status bersekolah, atau tidak ada yang belum sekolah atau putus sekolah. Beberapa tahun terakhir nyaris semua anak bersekolah hingga tamat SMP, namun ditemukan beberapa

yang tidak meneruskan ke SMP atau putus sekolah sebelum tamat SMP.

Kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa ini adalah: a) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri; b) Program Desa Mandiri Pangan; dan c) Program Beras Murah. Sasaran program ini adalah sebanyak 180 KK, dari 250 KK penduduk setempat, masing-masing 10 kilogram per bulan. Selain itu, desa memperoleh bantuan dana yang disebut: a) Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp.42.000.000,- Dana tersebut dimaksudkan untuk kesejahteraan aparat pemerintahan desa yang bersumber dari APBD kabupaten; Fress Money. sebesar Rp.50.000.000,- per tahun, bersumber dari APBD Provinsi Banten dan digunakan untuk mendukung operasional BPD sebesar Rp.2,5 juta; Karang Taruna sebesar Rp.2,5 juta; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp.2,5 juta; operasional Kades Rp.10 juta dan pembangunan fisik senilai Rp.32.500.000,-

Masalah utama masyarakat adalah kemiskinan. Kemiskinan berwujud dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimal. Rumah sangat sederhana, bahkan tidak layak; anak putus sekolah (umumnya setelah tamat SMP), makan “seketemunya”. Kemiskinan terjadi karena penghasilan sangat rendah. Penghasilan rendah terjadi karena sumberdaya yang dimiliki amat terbatas. Mayorita penduduk tidak memiliki lahan pertanian; berpendidikan rendah; dan tidak memiliki keterampilan kerja memadai. Kemudian mereka terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan, tidak ada sumber modal yang dapat diakses, tidak memiliki tabungan, jika ada kebutuhan mendesak meminjam pada rentenir atau membeli barang dari tukang kredit. Konsekuensinya, mereka dirugikan, membayar jauh di atas harga pasar. Dari aneka program yang ada tidak ditemukan yang menggalang

kekuatan swadaya masyarakat secara massive dan sistematis serta berkelanjutan. Semua program mengandalkan bantuan dari luar dan kelompok sasaran sangat terbatas.

Melalui diskusi dengan teknik *Participatory Wealth Ranking (PWR)*, peserta berhasil mengidentifikasi sebanyak 208 KK penduduk Desa ini. Menurut kondisi kesejahteraan sosial ekonomi, seluruh keluarga tersebut oleh peserta dibedakan menjadi 4 peringkat mulai dari: sangat miskin sebanyak 30 KK, miskin sebanyak 100 KK, hampir miskin sebanyak 50 KK dan tidak miskin sebanyak 28 KK.

Ketika dilakukan review pada bulan Juli 2011 tidak ditemukan perubahan signifikan sejak akhir penelitian pertama, tahun 2010., baik dalam aspek geografis wilayah, kependudukan, sosial budaya, kepemimpinan, maupun kelembagaan desa. Demikian juga dalam hal permasalahan kesejahteraan, kemiskinan masih merupakan masalah utama, seperti diuraikan di atas. Fenomena baru yang menonjol adalah munculnya usaha budidaya bibit lele secara massive, hampir di semua pekarangan rumah penduduk terdapat kolam yang dibuat dari bahan plastik. Namun belakangan, Oktober 2011, hampir semua kolam terbengkalai.

Hal lain, di desa ini dilaksanakan puluhan program/kegiatan pembangunan dari sejumlah satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten setempat dengan total nilai anggaran sebesar Rp.760 juta. Namun tidak ditemukan program yang diarahkan untuk membangun kemampuan mandiri masyarakat sebagai kesatuan sosial. Hal tersebut berarti, LKS sebagai wadah kerjasama seluruh lapisan masyarakat masih relevan. Hal ini merupakan kesimpulan dari diskusi bersama warga yang ikut dalam proses pembentukan, termasuk pengurus dan pengawas.

### **Kondisi LKS Mitra Warga**

Ketika dilakukan review 20 Juni 2011, hampir setahun setelah dibentuk, LKS masih eksis namun belum berkembang seperti diharapkan. Jumlah anggota baru sebanyak 23 orang, tidak mencapai target sebanyak 40 orang. Dari 23 orang tersebut 21 orang merupakan peserta pembentukan dan dua orang bukan peserta. Hal tersebut mengandung makna bahwa motivasi yang diberikan selama proses penelitian tahun 2010 belum cukup efektif mendorong semua peserta bergabung menjadi anggota secara sukarela. Dana Bersama Masyarakat yang terkumpul masih sangat kecil, Rp.1.800.000,-. Jauh dibawah target sebesar Rp.3.000.000,-. Keluarga yang diberi bantuan baru satu keluarga dengan nilai bantuan Rp.200.000,- Padahal targetnya dapat membantu hingga lima keluarga dengan nilai Rp.2.500.000,- Sosialisasi yang direncanakan dilakukan di 4 lokasi, hanya dilakukan sekali di satu lokasi.

Berdasarkan diskusi dengan Pengurus dan Pengawas diketahui bahwa LKS menghadapi sejumlah kendala, yaitu: (1) Sebagian terbesar Pengurus tidak aktif. Hal ini terjadi karena ketua mengalami kecelakaan sebulan setelah terpilih dan tidak bisa menjalankan tugas. Sementara itu pengurus lain tidak berani mengambil kebijakan. Di samping itu para pengurus, lainnya, yang sebenarnya diharapkan menjalankan roda organisasi, sibuk dengan urusan masing-masing. Selain itu, harus diakui bahwa kemampuan dan pemahaman pengurus juga relative masih sangat terbatas. Mereka semua praktis belum akrab dengan dunia kesejahteraan sosial; (2) Sebagian besar warga masyarakat belum mengenal bahkan belum pernah mendengar LKS. Mereka yang sudah mendengar sebagian besar belum memperoleh pemahaman dengan benar, mereka menilai LKS kurang praktis karena harus menabung. Mereka mengharapkan diberi pinjaman terlebih dahulu baru menabung; (3) Pendapatan

mayoritas masyarakat tidak tetap dan kecil sehingga merasa tidak sanggup melaksanakan kewajiban menabung secara rutin tiap bulan. Mereka tidak percaya bahwa dirinya mampu, katanya: *“makan saja susah bagaimana kami bisa menabung?”*. *“Masyarakat maunya diberi pinjaman dulu, baru masuk menjadi anggota LKS”*. Hal ini kiranya juga terkait dengan persepsi masyarakat atas program pemerintah yang cenderung selalu mengedepankan bantuan; (4) Warga enggan datang ke kantor LKS di balai desa, lokasinya jauh, memerlukan biaya apabila harus kesana, banyak kesibukan; (5) Masyarakat mempunyai pengalaman buruk dengan *“simpan pinjam”* lain, simpanan sulit ditarik kembali.

### **Intervensi Pengembangan**

Setelah review, kepada peserta ditanyakan apakah eksistensi LKS masih diperlukan, relevan untuk masyarakat setempat. Seluruh peserta pembentukan, pengurus dan pengawas serta kepala desa bersepakat bahwa LKS masih sangat relevan karena itu harus tetap hidup dan dikembangkan. Untuk itu disepakati untuk melakukan sejumlah kegiatan (Kontrak sosial), yaitu: (1) Melaksanakan sosialisasi kepada warga di tiga lokasi; (2) Mengisi jabatan ketua dan seksi; (3) Mengatur kembali sistem pelayanan; (4) Pelatihan sekaligus pembenahan pembukuan simpan pinjam; (5) Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas, tahun 2010-2011; (6) Penyusunan Rencana Kerja Pengurus dan Pengawas, tahun 2011-2012; (7) Menyelenggarakan Rapat Anggota tahunan (RAT)

Pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut didukung penuh oleh tim peneliti, dengan bertindak sebagai CD Worker, sedangkan Pengurus dan Pengawas sebagai subjek. Posisi peneliti amat penting karena setiap kegiatan sekaligus merupakan wahana pendidikan/pembelajaran bagi pengurus maupun pengawas. Bantuan sosial berupa

uang tunai sebesar Rp.10.0000.000,- diberikan kemudian, September 2011, setelah organisasi memperlihatkan kinerjanya. Bantuan dipandang penting, selain untuk menambah modal, juga untuk memperlihatkan bahwa pemerintah (tim peneliti) memiliki komitmen dan menghargai upaya yang sudah dilakukan masyarakat.

### **Perubahan Kondisi LKS Mitra Warga setelah Intervensi**

Berdasarkan evaluasi terakhir, 14 Oktober 2011, LKS Mitra Warga sudah memperlihatkan perkembangan signifikan, yang dicerminkan oleh indikator berikut: (1) Jumlah anggota bertambah menjadi 72 orang dari 23 orang sebelum dilakukan intervensi, Juni 2011; (2) Dana Bersama LKS dari tabungan anggota mengalami kenaikan signifikan, yaitu dari Rp.1.800.000 menjadi Rp.7.530.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah); (3) Keluarga yang dibantu dengan pinjaman murah dari Dana Bersama Masyarakat sudah mencapai 15 orang dengan total nilai sebesar Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Bantuan tersebut digunakan untuk aneka kebutuhan, yaitu: pendidikan 5 orang, perbaikan rumah/rehab. dapur 1 orang, beaya istri melahirkan (kesehatan) 1 orang, untuk beaya berobat orang tuanya 1 orang, cicilan motor 1 orang, modal usaha 5 orang dan beaya pemakaman 1 orang; (3) Pengurus sudah lengkap dan tampak bekerja dengan solid, walaupun sama sekali tanpa imbalan; (4) Kegiatan pelayanan lebih mudah diakses oleh warga, karena selain membuka kantor juga menerapkan sistem jemput bola dengan jadwal teratur, setiap tanggal 8 dan 9; (5) Proses menuju badan hukum sudah dilakukan lebih intensif, draf AD/ART sudah tersusun; (6) Dalam perkembangannya saat ini anggota LKS sebagian (tiga orang) berasal dari desa tetangga. Diperkirakan jika dilakukan sosialisasi ke desa sekitar maka akan semakin banyak warganya mendaftar jadi anggota.

### **Efektifitas Pengembangan**

Menilik indikator di atas, perkembangan jumlah anggota, dana bersama yang dikumpulkan melalui mekanisme tabungan, dan bantuan yang diberikan kepada keluarga melalui mekanisme pinjaman dapat disimpulkan bahwa berbagai tindakan intervensif yang dilakukan telah berhasil mengembangkan LKS Mitra Warga. Perkumpulan tersebut kini telah memiliki kekuatan, betapa pun kecil, telah berhasil menggalang dana masyarakat dan membantu anggotanya. Bertambahnya anggota mencerminkan bahwa warga setempat semakin banyak mengenal dan menerima eksistensi lembaga ini. Hal ini juga mengandung makna bahwa trust sebagai modal sosial telah mulai tumbuh. Pada pihak lain sosialisasi yang dilakukan pengurus dengan didukung tim peneliti telah menghasilkan: a) Perubahan pada aspek kognitif warga. Pada satu sisi mereka lebih mengenal, memahami LKS dan pada sisi lain menyadari masalah dan kebutuhannya (baik secara individual maupun kelompok) dikaitkan dengan masa depan yang harus dibangun; b) Perubahan pada aspek afektif (sikap), ditandai dengan munculnya komitmen untuk bergabung secara sukarela menjadi anggota LKS dan mau menabung dengan menyisihkan penghasilan; c) Perubahan pada aspek *attitude* (perilaku) warga, yang ditunjukkan dengan inisiatif mendaftarkan diri menjadi anggota LKS dan melakukan kewajiban, menabung secara rutin.

Intervensi lain, fasilitasi pengisian jabatan yang kosong, yang pada akhirnya berkembang menjadi konsolidasi personil dengan sedikit perubahan struktur; penataan kembali sistem pelayanan (dari menunggu menjadi jemput bola); pembenahan pembukuan (pengecekan dan pembetulan); Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas, tahun 2010-2011; Penyusunan Rencana Kerja Pengurus dan Pengawas, tahun 2011-2012;

dan fasilitasi penyelenggaraan Rapat Anggota tahunan (RAT) yang secara keseluruhan difasilitasi oleh peneliti dan dengan sadar dilakukan sebagai proses pembelajaran sekaligus menumbuh-kembangkan semangat (motivasi) kesetiakawanan melalui LKS.

Kegiatan interventif ini telah berhasil mengatasi aneka kendala yang bersumber dari kepengurusan, seperti: kekosongan jabatan ketua dan seksi; mengatasi keengganan warga datang ke kantor LKS di Balai Desa; membetulkan pembukuan keuangan; meningkatkan keterampilan pengurus dan pengawas dalam Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas, tahun 2010-2011 dan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pengurus dan Pengawas, tahun 2011-2012 dan dalam Menyenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Melalui RAT dimana segala sesuatu diputuskan bersama diharapkan anggota juga semakin menyadari LKS adalah milik mereka dan memahami bagaimana berorganisasi (modern).

Mengacu pada penjelasan ini, terlihat bahwa teknik intervensi yang digunakan relatif efektif mengembangkan LKS. Diantara sesama anggota dan pengurus LKS telah terbangun "trust". Mekanisme kerja organisasi cukup operasional. Masyarakat telah mulai memiliki keyakinan bahwa "kami bisa", dalam arti mampu berorganisasi modern dan mampu mengakumulasi modal. Ini adalah sebuah perubahan amat progressive menuju masyarakat berdaya. Hal ini menjadi modal sosial yang kuat bagi masyarakat, nilai-nilai kesetiakawanan sosial mulai diwujudkan menjadi kekuatan riil menolong sesamanya. LKS Mitra Warga sebagai prototype mekanisme merubah potensi menjadi sumber kesejahteraan mandiri dan berkelanjutan seperti diharapkan Renstra Kementerian Sosial 2009-2014 telah mulai bekerja.

### **LKS sebagai Lembaga Penanggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan masyarakat Desa Pasir Karag memiliki sifat yang kompleks, merupakan kemiskinan struktural, kultural maupun individual. Mengatasi kemiskinan demikian memerlukan penanganan serius, secara logika diperlukan perubahan struktural, kultural maupun individual. Menurut Tatag Wiratno, penanggulangan kemiskinan sebagai kegiatan pemberdayaan, seperti dikutip di atas, terdapat tiga pilihan konsep dan praktek pemberdayaan, seperti diuraikan di atas.

Dari ketiga pilihan tersebut kiranya yang paling mungkin dilakukan adalah yang pertama dan kedua. Pada tataran penelitian ini upaya yang dilakukan baru sebatas rekayasa masyarakat. Masyarakat direkayasa sedemikian rupa hingga mereka atas kesepakatan bersama membentuk perkumpulan yang dinamakan LKS. LKS berfungsi menggalang dana bersama melalui mekanisme tabungan. Dana bersama digunakan membantu setiap keluarga yang memerlukan, untuk memenuhi kebutuhan anggotanya (kesehatan, pendidikan, rumah, modal usaha, dll), melalui mekanisme pinjaman.

Dalam prakteknya hingga sejauh ini, dari Juli sampai Oktober 2011, yang sudah dilayani mencapai 15 orang anggota dengan total nilai sebesar Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Pinjaman tersebut digunakan untuk aneka kebutuhan keluarga, yaitu: pendidikan anak 5 orang, modal usaha 5 orang, perbaikan rumah/rehab dapur 1 orang, biaya istri melahirkan 1 orang, untuk biaya berobat orang tuanya 1 orang, cicilan motor 1 orang, dan biaya pemakaman 1 orang. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, realita ini mengandung banyak makna, antara lain: 1) Masyarakat sudah memiliki mekanisme menolong warganya, tanpa saling merugikan. Ini modal awal yang cukup memadai; 2) Walaupun

dengan mekanisme meminjam, kebutuhan dasar anggota keluarga tersebut terpenuhi pada saat yang tepat; 3) Pada saat bersamaan masyarakat telah berhasil menopang peningkatan kualitas keluarga (menjalankan fungsi sosial) memenuhi kebutuhan anggotanya; 4) Masyarakat melalui LKS telah berhasil melakukan perlindungan sosial bagi warganya dari jeratan rentenir (seperti selama ini), sehingga juga berarti telah membebaskan dari proses pemiskinan.

### Konstruksi LKS

Mencermati proses dan hasil penelitian aksi ini, draf konstruksi LKS yang sudah dirumuskan tahun 2010 yang lalu tidak memerlukan perubahan prinsipil, bahkan mendapat

peneguhan (lihat Tabel). Beberapa perubahan yang dilakukan lebih berupa penataan narasi, tanpa merubah substansi. Pada aspek struktur organisasi, walaupun pada perjalanan awal LKS memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan, namun tidak ditemukan prinsip mendasar yang perlu dilakukan perubahan. Perubahan dilakukan pada susunan pengurus, yang semula terdapat dua orang bendahara dirubah menjadi satu orang. Perubahan ini sesungguhnya lebih merupakan penataan personil, di mana personil yang semula menduduki bendahara II, dipandang lebih efektif ditempatkan pada jabatan lain, yaitu seksi pelayanan sosial.

Tabel 2: Narasi Konstruksi Lembaga Kesejahteraan Sosial

No.	Draf Konstruksi LKS (Hasil penelitian 2010)	Konstruksi LKS (Hasil Penelitian 2011)	Keterangan Perubahan
1	2	3	4
1	Merupakan perkumpulan sosial warga masyarakat desa setempat. Artinya, LKS memiliki anggota dan LKS adalah milik anggotanya	Merupakan perkumpulan sosial warga masyarakat desa setempat. Artinya, LKS memiliki anggota dan LKS adalah milik anggotanya. Dibentuk oleh masyarakat melalui proses musawarah	Penambahan narasi tentang proses
2	Oleh karena itu kekuasaan tertinggi pada LKS berada pada anggota, melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT).	Kekuasaan tertinggi pada LKS berada pada anggota, dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT).	Penataan narasi
3	Anggota LKS adalah perorangan, warga setempat yang terdaftar dalam buku daftar anggota. Keanggotaan bersifat sukarela, tanpa dipaksa, dan terbuka bagi semua warga setempat, laki-laki - perempuan, PMKS - non PMKS.	Keanggotaan LKS bersifat perorangan, sukarela, tanpa dipaksa, dan terbuka bagi semua warga setempat, baik laki-laki maupun perempuan, PMKS - non PMKS. Keanggotaan dibuktikan dengan buku daftar anggota.	Penataan narasi
4	Dalam LKS setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama.	Dalam LKS setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama	Tetap
5	Tujuan utama LKS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.	Tujuan utama LKS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.	Tetap
6	LKS merupakan organisasi <i>pure non profit</i> .	LKS merupakan organisasi <i>pure non profit</i> .	Tetap
7	Untuk mencapai tujuannya, seluruh anggota saling bekerjasama menyelenggarakan dua kegiatan pokok yaitu: kegiatan pelayanan sosial dan kegiatan simpan pinjam.	Untuk mewujudkan tujuannya, seluruh anggota sepakat untuk bekerjasama saling membantu dengan menyelenggarakan dua kegiatan pokok yang saling menunjang, yaitu: 1) Pelayanan sosial dan 2) Pelayanan ekonomi	Penataan narasi

1	2	3	4
8	LKS menyelenggarakan jasa pinjaman. Uang simpanan anggota yang telah terakumulasi disalurkan sebagai pinjaman kepada anggota. Pinjaman disalurkan untuk tujuan menunjang anggota sesuai kepentingan, seperti: modal usaha dan kesejahteraan lainnya.	Pelayanan ekonomi dimaksud adalah kegiatan penggalangan dan penyaluran dana bersama melalui mekanisme tabungan dan pinjaman. Setiap orang anggota diwajibkan menabung pada LKS secara rutin minimal sekali dalam sebulan. Dana bersama yang sudah terakumulasi kemudian digunakan	Penggabungan dan penataan narasi
9	Kegiatan sosial dimaksud meliputi bidang amat luas sesuai kesepakatan, yang seluruhnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya.	membantu anggota yang membutuhkan, namun bantuan bukan sebagai hibah atau derma melainkan dalam bentuk pinjaman murah dan cepat. Sedangkan Pelayanan sosial dimaksud meliputi bidang amat luas sesuai kesepakatan, yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.	
10	Struktur organisasi disusun sedemikian rupa, sehingga kontrol anggota atas jalannya organisasi tetap berlangsung, meliputi Pengurus dan Pengawas. Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pelayanan social dan seksi pelayanan ekonomi. Pengawas terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota.	Struktur organisasi disusun sedemikian rupa, sehingga kontrol anggota atas jalannya organisasi tetap berlangsung, meliputi Pengurus dan Pengawas. Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pelayanan social dan seksi pelayanan ekonomi. Pengawas terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota.	Tetap
11	Seluruh ketentuan kelembagaan dan kegiatan organisasi diadministrasikan dengan baik, terstandar, rapi dan tertib untuk memelihara kepercayaan anggota; dengan prinsip-prinsip organisasi modern: transparansi, akuntabel.	Seluruh ketentuan kelembagaan dan kegiatan organisasi diadministrasikan dengan baik, terstandar, rapi dan tertib untuk memelihara kepercayaan anggota; dengan prinsip-prinsip organisasi modern: transparansi, akuntabel.	Tetap
12	Organisasi dibentuk sebagai lembaga formal. Karena itu pembentukan LKS harus disahkan sebagai badan hukum perkumpulan sosial oleh Notaris.	Organisasi dibentuk sebagai lembaga formal. Karena itu pembentukan LKS harus disahkan sebagai badan hukum perkumpulan sosial oleh Notaris.	Tetap
13	Sebagai organisasi sosial LKS harus berlandaskan ketentuan yang berlaku (dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945); Menjunjung tinggi nilai-nilai: kekeluargaan, demokrasi, kesetiakawanan sosial, persamaan martabat dan kemandirian	LKS berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjunjung tinggi nilai-nilai: kekeluargaan, demokrasi, kesetiakawanan sosial, persamaan martabat dan kemandirian	Tetap
14	Administrasi keuangan disusun sederhana namun sesuai azas-azas akuntansi. Untuk itu LKS didukung dengan kelengkapan administrasi misalnya: (a) buku induk anggota, memuat nama dan identitas anggota; (b) buku simpanan dan pinjaman anggota yang memuat catatan setiap transaksi simpanan dan pinjaman (dipegang masing-masing anggota); (c) slip uang masuk; (d) slip uang keluar; (e) kartu simpanan dan pinjaman anggota, catatan setiap transaksi simpanan dan pinjaman (dipegang pengurus); (d) laporan keuangan, memuat catatan aktiva lancar dan tetap serta modal sendiri dan hutang.	Administrasi keuangan disusun sederhana namun sesuai azas-azas akuntansi. Untuk itu LKS didukung dengan kelengkapan administrasi misalnya: (a) buku induk anggota, memuat nama dan identitas anggota; (b) buku simpanan dan pinjaman anggota yang memuat catatan setiap transaksi simpanan dan pinjaman (dipegang masing-masing anggota); (c) slip uang masuk; (d) slip uang keluar; (e) kartu simpanan dan pinjaman anggota, catatan setiap transaksi simpanan dan pinjaman (dipegang pengurus); (d) laporan keuangan, memuat catatan aktiva lancar dan tetap serta modal sendiri dan hutang.	Tetap

Pengalaman LKS Mitra Warga mengalami stagnasi selama 10 bulan karena ketua berhalangan (sakit) perlu mendapat perhatian. Suatu organisasi semestinya tidak boleh stagnan walau pun ketuanya berhalangan. Persoalannya pada kasus ini adalah sekretaris yang semestinya mengambil alih sementara jalannya organisasi ternyata tidak melakukannya. Oleh sebab itu dalam ketentuan operasional (Anggaran Rumah Tangga) sebaiknya ada ketentuan yang mengatur situasi demikian, sehingga keadaan tanpa ketua tidak berlarut-larut.

Khusus pada aspek kewilayahan, data lapangan menunjukkan bahwa anggota LKS tidak terbatas hanya warga satu desa tetapi sudah terbuka untuk warga desa sekitarnya. Ini berarti bahwa keanggotaan LKS harus dinyatakan terbuka bagi warga sekitar desa. Sedangkan pada aspek lain tidak mengalami perubahan. Mengingat bahwa konstruksi ini masih diabstraksikan dari pengamatan LKS Mitra Warga pada kondisi tahun 2010 dan 2011, maka konstruksi ini masih perlu kajian lebih lanjut.

## **PENUTUP**

Berangkat dari uraian di atas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan LKS tidak secara langsung berhasil, seperti pada kasus ini, ada kemungkinan menghadapi kendala. Namun adanya kendala bukan berarti gagal tetapi diperlukan intervensi lanjutan sesuai kebutuhan. Pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Mitra Warga di Desa Pasir Karag agar berfungsi optimal sebagai wadah masyarakat mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial, terutama kemiskinan telah berhasil dilakukan melalui sejumlah tindakan intervensif yang ditetapkan bersama oleh tim peneliti dengan

pengurus dan pengawas. Penetapan tindakan intervensif dilakukan setelah melalui proses review. Dalam seluruh proses, pengurus, pengawas dan anggota sebagai representasi masyarakat dengan sadar selalu diposisikan sebagai subjek.

2. Draf konstruksi LKS seperti sudah dirumuskan tahun 2010 untuk sementara cukup memadai sebagai mekanisme masyarakat untuk saling membantu, sekaligus merubah potensi menjadi sumber kesejahteraan sosial yang riil, mampu menjawab aneka kebutuhan semua lapisan, secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan penataan beberapa bagian narasi draf dapat dinyatakan menjadi konstruksi LKS. Perkumpulan sosial masyarakat yang terbuka bagi semua warga dapat menggali kekuatan riil masyarakat dalam bentuk dana bersama dengan mekanisme tabungan. Dengan dana bersama yang dimiliki, masyarakat dapat membantu anggotanya melalui mekanisme pinjaman, untuk menjalankan fungsi sosialnya, memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk mencegah munculnya permasalahan kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan.

Tim peneliti menyadari sepenuhnya, masyarakat berdaya tidak otomatis berhasil diwujudkan begitu proses penelitian selesai. Pertanyaannya adalah apakah kita bekerja menuju ke sana atau tidak?. Jawabannya adalah “ya”. Masyarakat, melalui LKS, sudah memiliki mekanisme menolong sesamanya dengan mekanisme relative ideal. Melalui mekanisme itu masyarakat dimungkinkan bergerak terus membangun kekuatan mandiri untuk mengatasi permasalahannya, meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Perlu replikasi LKS di wilayah berbeda sehingga kelak diperoleh formulasi proses

pembentukan maupun formulasi konstruksi yang *applicable* untuk masyarakat lokal (desa) dengan karakteristik demografi dan geografi berbeda.

2. Bagi LKS Mitra Warga, perlu dilakukan upaya pengembangan lebih lanjut, pada seluruh aspek-aspek organisasionalnya. Pada aspek pelayanan, pelayanan ekonomi maupun aspek pelayanan sosial perlu dikembangkan seimbang dan saling menunjang. Lain itu, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan badan hukum harus diselesaikan. Soliditas dan kompetensi personil pengurus dan pengawas mendesak ditingkatkan.

\*\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Allen P. & Anne M. (1973). *Social work: Model and Methode; F.E.Peacock Publishers, Inc., Illionis*, saduran Drs. Soetarso; 1977, Praktek Pekerjaan Sosial, Jilid I; Bandung: STKS
- Badan Pusat Statistik (2008). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (2005). *Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin*: Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Horton, Paul B, Hunt, Chester L terjemahan: Aminuddin Ram dan Tita Sobari (1987) *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Kontjaraningrat, (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. ke-8, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sunarto K. (2000). *Pengantar Sosiologi*, edisi ke-2, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI).
- Moloeng, L.J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cetakan ke-17, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Thomas, M. & John Pierson (Principial Editor) (2005). Dalam *Dictionary of social work*
- Sitepu, A. dkk (2010). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: P3KS Press
- Suradi & Mujiadi, (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Lima Provinsi*, Jakarta: P3KS Press.
- Wiranto T. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Perdesaan dalam Herman Haeruman Js dan Erlyatno (penyunting) Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Bunga Rampai)*, Jakarta: Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan Business Innovation Center of Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Renstra Kementerian Sosial Tahun 2010-2014, Kementerian Sosial, Jakarta, 2010
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial